

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Rdar Kedu	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Jepara

Halaman 2

## Belanja Daerah Bertambah Rp 43,398 M

### Penetapan APBD Perubahan

**KOTA** - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBDP Kabupaten Jepara 2018 telah ditetapkan. Dalam APBD perubahan belanja daerah sepanjang 2018 direncanakan mencapai Rp 2,4 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Lukito Sudiasmara menjelaskan, belanja daerah tersebut semula sebesar Rp 2,358 triliun. Kemudian setelah disesuaikan, bertambah Rp 43,398 miliar. Sehingga total belanja daerah mencapai Rp 2,4 triliun. "Kenaikan belanja itu, berkolerasi terhadap kesepakatan kenaikan pendapatan daerah dalam jumlah yang sama," terangnya.

Sedangkan pendapatan daerah yang semula Rp 2,120 triliun bertambah Rp 134,584 miliar. Jadi total pendapatan Rp 2,255 triliun. Dari total pendapatan dan belanja daerah tersebut dinyatakan defisit Rp 146,4 miliar. "Defisit anggaran akan kami tutup menggunakan sisa lebih pembiayaan. Tentu dengan estimasi yang telah diperhitungkan," ujarnya.

Asumsi penutupan defisit berasal dari sisa penerimaan sejumlah Rp 161,4 miliar. Kemudian dikurangi pengeluaran sebesar Rp 15 miliar. Muncul lah sisa lebih pembayaran Rp 146,4 miliar untuk menutup defisit anggaran.

Pendapatan dan belanja daerah ini sebelumnya telah disepakati dewan setelah dilakukan sejumlah rasionalisasi belanja, serta kenaikan sejumlah target

pendapatan. "Pendapatan pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu ditingkatkan atau ditambah sebesar Rp 1 miliar," katanya.

Dengan kenaikan ini total pendapatan pajak 2018 ditarget sebesar Rp 98,852 miliar. Kenaikan target pendapatan pajak itu Rp 850 juta di antaranya bersumber dari pendapatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Rp 150 juta lainnya bersumber dari target kenaikan pajak air tanah.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain, juga dipatok menaikkan target pendapatan dalam nilai bervariasi. OPD tersebut di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaam Umum dan Perumahan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (**war/zen**)